



Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022

Nabilah^{1*}, Hailuddin¹, I Dewa Ketut Yudha S¹

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

Article Info

Received: July 17, 2024

Revised: August 12, 2024

Accepted: September 19, 2024

Published: September 30, 2024

Corresponding Author:

Nabilah

nabilaharchive@gmail.com

DOI: [10.29303/alexandria.v5i2.622](https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i2.622)

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a(CC-BY License)



Abstract: This study uses financial ratio analysis of the Regional Revenue and Expenditure Budget to assess the financial capability of regions in funding autonomy. This descriptive research employs quantitative analysis methods. The analysis tools include Mapping and Analysis of Regional Financial Capability using the Quadrant Method, Local Revenue Effectiveness Ratio, Degree of Independence, Patterns of Relationships between Central and Local Governments, Degree of Regional Dependence, and Regional Financial Capability Mapping. The data used is secondary data regarding the Regional Revenue and Expenditure Budget for the fiscal years 2018-2022. The study results show: (1) North Lombok Regency is in quadrant I; (2) Most Regencies/Cities in West Nusa Tenggara are ineffective in terms of Local Revenue Effectiveness Ratio; (3) The Regional Independence Level is low, only reaching 14.93, indicating an instructive relationship pattern with the central government.

Keywords: Mapping of Local Revenue, Regional financial performance, Growth and Share.

Pendahuluan

Krisis moneter dan transisi politik di Indonesia mendorong desakan untuk koreksi kebijakan pemerintah, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini karena dominasi pemerintah pusat dianggap terlalu besar, menyebabkan kurangnya kebebasan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lokal. Dampaknya adalah ketimpangan dan kesenjangan di berbagai daerah, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk mengatasi hal ini, perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi diperlukan. Hal ini penting untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013). Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan seluruh daerah di Indonesia dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya untuk menjalankan segala urusan pemerintahan dan pembangunan. (Hidayat, 2016:65). Dengan otonomi daerah, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lokal untuk pembangunan, sambil tetap mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, investasi swasta diharapkan menjadi penunjang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Manajemen keuangan daerah yang transparan, demokratis, efektif, dan efisien juga penting, serta perlu didukung dengan kajian mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Pengelolaan keuangan daerah di era otonomi merupakan aspek penting yang perlu diatur, terutama terkait anggaran. Fokus utama harus pada kepentingan publik, tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan

daerah. Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. Tujuan utama analisis melalui metode pemetaan adalah pengelompokan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik diantara objek-objek tersebut. (Munir, 2012).

Kinerja mencerminkan sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan mencapai tujuan organisasi. Kinerja individu dan organisasi sangat erat kaitannya, di mana pencapaian tujuan organisasi publik bergantung pada pemanfaatan sumber daya oleh individu dalam organisasi tersebut.

Indikator sederhana untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah pertumbuhan dan share PAD. Kedua indikator ini menunjukkan peran PAD terhadap APBD berdasarkan pertumbuhan tahunan dan persentasenya terhadap total penerimaan dalam APBD (Kuncoro, 2004: 18). Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah di tingkat provinsi dan membentuk pola pemetaan kemampuan keuangan daerah.

Untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan, demokratis, efektif, dan efisien, diperlukan kajian mendalam terkait keuangan pemerintah daerah. Kajian ini penting sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Selain itu, kajian ini dapat menjadi alat evaluasi dan standar untuk masa mendatang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah, dalam bentuk peta pendapatan asli daerah, dan mengukur kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Provinsi NTB terdiri dari delapan kabupaten, dua kota, 117 kecamatan, dan 1143 desa/kelurahan, dengan luas daratan 20.153,15 km². Menurut data BPS 2019, jumlah penduduk NTB adalah 5.320.092 jiwa dengan kepadatan 264 jiwa per km². Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 7940 jiwa per km².

Studi ini akan menganalisis keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB menggunakan pendekatan analisis pemetaan berdasarkan wilayah mandiri, kemampuan keuangan, dan ketergantungan, dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemetaan Kinerja Pendapatan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan nilai variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Fokus penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mengevaluasi kinerja anggarannya berdasarkan data perhitungan tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder, yang diperoleh dari beberapa sumber termasuk data statistik yang sudah ada dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari instansi terkait, khususnya BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Pemetaan Kinerja PAD

Kinerja PAD dilakukan dengan pengukuran pertumbuhan PAD dan kontribusinya terhadap APBD.

Perumusan selengkapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. } Growth &= \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \\ \text{b. } Share &= \frac{PAD}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah t tahun

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah t tahun

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah t tahun-1

Berikut adalah peta kinerja PAD berdasarkan metode kuadran:

<u>Kuadran III</u> Share: Tinggi Growth: Rendah	<u>Kuadran I</u> Share: Tinggi Growth: Tinggi
<u>Kuadran IV</u> Share: Rendah Growth: Rendah	<u>Kuadran II</u> Share: Rendah Growth: Tinggi

Sumber: (Basri 2013:83)

2. Kemampuan Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.

- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

b. Tingkat Kemandirian Daerah

$$TKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Transfer (TPT)}}$$

c. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) diberikan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
≤ 25	Tidak mampu	Rendah sekali	Instruktif
25 – 50	Kurang mandiri	Rendah	Konsultatif
51 – 75	Cukup mandiri	Sedang	Partisipatif
76 – 100	Sudah mandiri	Tinggi	Delegatif

d. Tingkat Ketergantungan Daerah

$$TKtD = \frac{\text{Penerimaan Transfer (PT)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

Selanjutnya tingkat ketergantungan daerah ini diklasifikasi sebagai berikut:

Rasio (%)	Kesimpulan
≤ 25	Ketergantungan fiskal dinyatakan sangat kecil berarti kinerja anggaran sangat baik.
25 – 50	Ketergantungan fiskal dinyatakan cukup baik, yang berarti kinerja anggaran cukup baik.
51 – 75	Ketergantungan fiskal dinyatakan cukup besar yang berarti kinerja anggaran kurang baik.
76 – 100	Ketergantungan fiskal dinyatakan sangat besar yang berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali.

e. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	TKtDi > TKtD	TKtDi < TKtD
TKDi > TKD	Wilayah mandiri dengan tingkat ketergantungan tinggi.	Wilayah mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah.
TKDi < TKD	Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi.	Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan rendah.

Keterangan:

TKDi = Tingkat Kemandirian Daerah i

TKtDi = Tingkat Ketergantungan Daerah i

TKD = Rata-rata Tingkat Kemandirian Daerah

TKtD = Rata-rata Tingkat Ketergantungan Daerah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Kinerja PAD

a. Pertumbuhan PAD

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PAD (%)
Kabupaten Lombok Barat	6,02
Kabupaten Lombok Tengah	8,88
Kabupaten Lombok Timur	8,03
Kabupaten Sumbawa	5,34
Kabupaten Dompu	8,26
Kabupaten Bima	4,06
Kabupaten Sumbawa Barat	20,52
Kabupaten Lombok Utara	8,62
Kota Mataram	5,78
Kota Bima	6,14
Rerata	8,17

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat adalah 8,17%. Dari sepuluh Kabupaten/Kota di kawasan tersebut, pertumbuhan PAD terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (20,52%), diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah (8,88%), dan Kabupaten Lombok Utara (8,62%). Namun, pertumbuhan PAD relatif kecil di Kabupaten Bima (4,04%). Meskipun secara keseluruhan terjadi pertumbuhan positif, peningkatan PAD yang rendah disebabkan oleh kurangnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, menunjukkan kurangnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal.

b. Kontribusi PAD Terhadap APBD

Kabupaten/Kota	Kontribusi (%)
Kabupaten Lombok Barat	14,72
Kabupaten Lombok Tengah	9,26
Kabupaten Lombok Timur	11,81
Kabupaten Sumbawa	10,20
Kabupaten Dompu	10,28
Kabupaten Bima	7,48
Kabupaten Sumbawa Barat	9,83
Kabupaten Lombok Utara	13,36
Kota Mataram	26,91
Kota Bima	6,34
Rerata	12,02

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat membiayai seluruh kebutuhan belanja daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di provinsi tersebut adalah 12,02%, menunjukkan bahwa PAD belum cukup untuk membiayai belanja daerah secara keseluruhan, dengan sebagian besar masih bergantung pada subsidi dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan.

Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2018 bervariasi, dengan Kota Mataram memiliki kontribusi terbesar sebesar 26,91%, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat (14,72%) dan Kabupaten Lombok Utara (13,36%). Kabupaten/Kota lainnya memiliki kontribusi di bawah rerata, seperti Kabupaten Lombok Timur (11,81%), Kabupaten Dompu (10,28%), Kabupaten Sumbawa (10,20%), Kabupaten Sumbawa Barat (9,83%), Kabupaten Lombok Tengah (9,26%), Kabupaten Bima (7,48%), dan Kota Bima yang memiliki kontribusi terendah yaitu 6,34%.

c. Kinerja PAD Berdasarkan Metode Kuadran

Kuadran III Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram	Kuadran I Kabupaten Lombok Utara
Kuadran IV Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Bima Kota Bima	Kuadran II Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Dompu Kabupaten Sumbawa Barat

Diketahui bahwa Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kuadran I, yang berarti daerah ini dianggap ideal. Pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Utara sebesar 8,62% lebih tinggi dibandingkan rerata kawasan sebesar 8,17%, dan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 13,36% juga lebih tinggi dari rerata kawasan sebesar 12,02%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Lombok Utara berperan besar dalam APBD dan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal. Dengan PAD yang terus tumbuh dan kontribusi yang tinggi, daerah ini lebih fleksibel dalam menganggarkan belanja daerah untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pada kuadran II terdapat Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Meskipun pertumbuhan PAD mereka tinggi, kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah dibandingkan rerata provinsi. Share Kabupaten Dompu sebesar 10,28%, Kabupaten Sumbawa Barat 9,83%, dan Kabupaten Lombok Tengah 9,26% terpaut jauh dari rerata kawasan 12,02%. Rendahnya share ini disebabkan oleh besarnya belanja daerah yang tidak sebanding dengan PAD. Belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung, menunjukkan bahwa PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja konsumtif, sehingga kurang optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat.

Pada kuadran III adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Kondisi ini belum ideal karena kontribusi PAD terhadap APBD lebih besar dibandingkan rerata kawasan, tetapi pertumbuhan PAD lebih kecil. Hal ini menunjukkan peran PAD kecil, karena meskipun sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, pertumbuhan PAD rendah.

Pemerintah perlu mengubah alokasi belanja dengan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah harus memfasilitasi aktivitas ekonomi dengan membuka kesempatan

investasi dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan PAD.

Kuadran IV mencakup Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, yang memiliki kondisi paling buruk karena pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap APBD rendah. Ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD dan potensi daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi belanja dan meningkatkan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan PAD.

2. Kemampuan Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas PAD

Kabupaten/Kota	Efektivitas (%)
Kabupaten Lombok Barat	87,70
Kabupaten Lombok Tengah	89,14
Kabupaten Lombok Timur	90,52
Kabupaten Sumbawa	96,45
Kabupaten Dompu	108,46
Kabupaten Bima	91,32
Kabupaten Sumbawa Barat	93,48
Kabupaten Lombok Utara	84,47
Kota Mataram	105,11
Kota Bima	87,53
Rerata	93,42

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018-2022, Rasio Efektivitas PAD tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dicapai oleh Kabupaten Dompu dengan 108,46%, diikuti oleh Kota Mataram dengan 105,11%. Sementara itu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima memiliki rasio efektivitas di bawah rerata kawasan dan di bawah 100%, sehingga masuk dalam kategori tidak efektif.

Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berhasil merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemungutan PAD yang tidak efektif ini menandakan bahwa pemerintah belum efektif dalam mengelola keuangan daerahnya, dan belum mencapai sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

b. Tingkat Kemandirian Daerah (TKD)

Kabupaten/Kota	TKD
Kabupaten Lombok Barat	18,12
Kabupaten Lombok Tengah	11,04
Kabupaten Lombok Timur	14,55
Kabupaten Sumbawa	12,29
Kabupaten Dompu	11,84
Kabupaten Bima	8,71
Kabupaten Sumbawa Barat	10,72
Kabupaten Lombok Utara	16,49
Kota Mataram	38,44
Kota Bima	7,15
Rerata	14,93

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2022 tertinggi dicapai oleh Kota Mataram dengan 38,44%, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat dengan 18,12% dan Kabupaten Lombok Utara dengan 16,49%. Kabupaten lainnya berada di bawah rerata kawasan sebesar 14,93%, seperti Kabupaten Lombok Timur dengan 14,55%, Kabupaten Sumbawa dengan 12,29%, Kabupaten Dompu dengan 11,84%, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 10,72%, Kabupaten Lombok Tengah dengan 11,04%, Kabupaten Bima dengan 8,71%, dan Kota Bima dengan tingkat kemandirian terendah sebesar 7,15%.

Rendahnya rasio kemandirian ini disebabkan oleh belum optimalnya sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum dapat diandalkan untuk otonomi daerah, karena basis pajak/retribusi yang ada di daerah relatif rendah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan pemungutan berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah dan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi yang ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan pembiayaan, seperti kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan peningkatan PAD melalui pendirian BUMD di sektor-sektor potensial.

c. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kabupaten/Kota	TKD (%)	Kesimpulan	Pola Hubungan
Kabupaten Lombok Barat	18,12	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Lombok Tengah	11,04	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Lombok Timur	14,55	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Sumbawa	12,29	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Dompu	11,84	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Bima	8,71	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Sumbawa Barat	10,72	Tidak Mampu	Instruktif
Kabupaten Lombok Utara	16,49	Tidak Mampu	Instruktif
Kota Mataram	38,44	Kurang Mandiri	Konsultatif
Kota Bima	7,15	Tidak Mampu	Instruktif
Rerata	14,94		

Berdasarkan tabel diatas, selama periode tersebut, hanya Kota Mataram yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah dalam kategori kurang mandiri dengan pola hubungan konsultatif. Sementara itu, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori tidak mampu dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menopang pendanaan pembangunan belum cukup untuk mendukung otonomi daerah.

Peranan pemerintah pusat sangat dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah, tercermin dari besarnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam APBD. Kota Mataram sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi karena campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. Berdasarkan pola hubungan pemerintah, Kota Mataram termasuk dalam pola hubungan konsultatif, yang berarti bahwa pemerintahan daerah mulai bersifat finansial independen dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi, dan lainnya.

d. Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD)

Kabupaten/Kota	TKtD (%)	Ketergantungan Fiskal (%)	Kinerja Anggaran (%)
Kabupaten Lombok Barat	81,29	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Lombok Tengah	85,91	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Lombok Timur	83,30	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Sumbawa	84,31	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Dompu	78,70	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Bima	87,01	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Sumbawa Barat	88,10	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kabupaten Lombok Utara	81,41	Sangat Besar	Buruk Sekali
Kota Mataram	69,93	Cukup Besar	Kurang Baik
Kota Bima	91,55	Sangat Besar	Buruk Sekali
Rerata	83,15		

Berdasarkan tabel diatas, tingkat ketergantungan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tertinggi di Kota Bima dengan TKtD 91,55%, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat (88,10%), Kabupaten Bima (87,01%), Kabupaten Lombok Tengah (85,91%), Kabupaten Sumbawa (84,31%), Kabupaten Lombok Timur (83,30%), Kabupaten Lombok Barat (81,29%), Kabupaten Lombok Utara (81,41%), Kabupaten Dompu (78,70%), dan yang terkecil adalah Kota Mataram dengan TKtD 69,93%.

Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 83,15%, yang menurut kriteria rasio ketergantungan dari Depdagri (Basri 2013:83) menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang sangat buruk. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai pengeluarannya secara mandiri dan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam APBD.

Selain itu, jumlah penduduk yang terus berkembang tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan, terutama melalui PAD dan komponen-komponennya.

Intensifikasi penerimaan pajak, menarik investor, serta efisiensi dan efektivitas dalam pembelanjaan pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan sangat diperlukan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan daerah dapat meningkatkan kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

e. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota	TKD (%)	TKtD (%)
Kabupaten Lombok Barat	18,12	81,29
Kabupaten Lombok Tengah	11,04	85,91
Kabupaten Lombok Timur	14,55	83,30
Kabupaten Sumbawa	12,29	84,31
Kabupaten Dompu	11,84	78,70
Kabupaten Bima	8,71	87,01
Kabupaten Sumbawa Barat	10,72	88,10
Kabupaten Lombok Utara	16,49	81,41
Kota Mataram	38,44	69,93
Kota Bima	7,15	91,55
Rerata	14,94	83,15

Adapun klasifikasi kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	TKtD _i > TKtD	TKtD _i < TKtD
TKD _i > TKD		Kota Mataram Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lombok Barat
TKD _i < TKD	Kabupaten Sumbawa Kabupaten Bima Kota Bima Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat kemandirian di atas rata-rata dan tingkat ketergantungan di bawah rata-rata adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat.

Tidak ada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan di atas rata-rata. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan di bawah rata-rata adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu.

Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemandirian di bawah rata-rata dan tingkat ketergantungan di atas rata-rata adalah Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Ini berarti Kabupaten/Kota yang lebih mandiri dengan tingkat ketergantungan lebih kecil dari rata-rata namun masih memiliki angka ketergantungan yang tinggi adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten lainnya memiliki tingkat kemandirian di bawah rata-rata daerah.

Kesimpulan

1. Pemetaan Kinerja PAD

Berdasarkan pertumbuhan PAD dan kontribusinya terhadap APBD, Kabupaten Lombok Utara menunjukkan kinerja PAD yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Utara merupakan satu-satunya daerah yang berada dalam kondisi ideal di provinsi tersebut.

2. Kemampuan Keuangan Daerah

- a. Efektivitas PAD Kabupaten Dompu dan Kota Mataram adalah satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki rasio efektivitas PAD yang dikategorikan efektif.
- b. Tingkat Kemandirian Daerah Rerata Tingkat Kemandirian Daerah (TKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong rendah, dengan nilai hanya mencapai 14,93%. Kota Bima memiliki TKD terendah sebesar 7,15%, sedangkan Kota Mataram memiliki TKD tertinggi sebesar 38,44%.
- c. Tidak ada satu pun Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki pola hubungan Delegatif maupun Partisipatif selama periode 2018-2022.
- d. Berdasarkan rasio penerimaan transfer terhadap total pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan rendah.
- e. Hanya Kota Mataram yang memiliki tingkat kemandirian di atas rata-rata dan tingkat ketergantungan di bawah rata-rata dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Daftar Pustaka

- Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso. 2019. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jurnal Law Reform, Vol. 15 No. 1.
- Ahmad Mustanir dan Jusman. 2016. *Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Ilmiah Akmen. Vol. 13 No. 3.
- Aulia Effendi, Dwi Risma Devianti dan Ferry Diyanti. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Periode 2010-2014*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, Vol. 2 No. 4.
- Bachtiar Kustyan. 2015. *Analisis Kinerja Pendapatan Daerah (PAD) dan Identifikasi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (2008-2012)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7 No. 1.
- Bayu Kharisma. 2013. *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol. 14 No. 2.
- Cherrya Dhia Wenny. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2 No. 1.
- Deby Anggun Sari, Liona Efrina, Deki Irawan. 2023. *Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kerakyatan, Vol. 1 No.1
- Dedet Putra Hendriko. 2021. *Analisa Dan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Era Otonomi Daerah*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi. Riau: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Riau, I. 211-218.
- Dewi Ernita dan Eric Novrianda. 2020. *Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci*. Jurnal Agregate, Vol. 3 No. 2.
- Elita Dewi. 2007. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Univ. Sumatera Utara).
- Emillia Nurdin, Andi Basru Wawo dan Lilis Julia. 2018. *Pengaruh Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3.
- Fitria Amalia et all. 2022. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Bandung.
- Halim dan Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiskal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Hasan Basri, Syaparuddin dan Junaidi. 2013. *Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Povinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 2.
- Hery Susanto. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 10 No. 1.
- Hidayat dan Muhammad. 2016. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Sungkai, Vol. 4 No. 2.
- Jalaludin. 2021. *Mobilitas Dan Persebaran Penduduk NTB (Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No. 2.
- Juhadi dan Dewi Liesnoor. 2001. *Desain dan Komposisi Peta Tematik*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Sistem Informasi Geografis. Indoprint. Semarang.
- Koko Andriyanto. 2007. *Analisis Kemandirian Daerah Subosukawonosratendalam Pelaksanaan Sebelum*

- Dan Sesudah Otonomidaerah (Tinjauan Keuangan Daerah), *Jurnal Ekonomi*.
- Mela Titiani. 2016. *Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Subosukawonosraten Tahun 2014*. (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Univ. Sebelas Maret).
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236-242.
- Muammil Sun'an dan Abdurrahman Senuk. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Muhammad Noor. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Edisi Pertama. INTERPENA. Yogyakarta.
- Muhammad Safar Nasir. 2019. *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No. 1.
- Noldy Keintjem et all. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kota Manado)*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 22 No. 2.
- Nurul Amin. 2019. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis*. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*.
- Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida. 2020. *Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. *Jurnal Budget*, Vol. 5 No.2.
- Santoso, S. 2002. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Saragih dan Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi fiskal dan Keuangan daerah dalam otonomi*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sumardi. 2008. *Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah*, Semarang: Workshop DPRD Kabupaten Nganjuk.
- Taufik Kurrohman. 2010. *Pemetaan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Jawa Timur Berbasis Sistem Informasi Geografi*. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 9 No.1.
- Tri Ratnawati. 2009. *Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5 No. 2. Kabupaten Gorontalo.
- Winarna Surya Adisubrata. 2002. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Edisi Revisi: Cetakan Kedua. Unit Penerbit dan Percetakan. Yogyakarta.
- Yuliastati K. 2017. *Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No.4